

ABSTRAK

Pelembagaan partai politik hingga kini masih belum menjadi prioritas utama dalam upaya melembagakan demokrasi di Indonesia. Sering kali studi tentang pelembagaan partai politik hanya mengukur kuat dan lemahnya pelembagaan partai, tanpa melihat bagaimana proses pelembagaan tersebut berlangsung. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini ingin melacak bagaimana proses transformasi pelembagaan partai politik di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini mengambil kasus transformasi pelembagaan PKB dari Era Gus Dur (1998-2008) ke Era Muhaimin Iskandar (2009-2014). Untuk mengurai proses transformasi pelembagaan, penelitian ini menggunakan konsep pelembagaan Randal dan Svasand (2002) yang cenderung melihat pelembagaan partai sebagai sebuah pola pengelolaan partai berdasarkan empat dimensi, yaitu dimensi *systemness*, *value infusion*, *decision autonomy*, dan *reification*.

Untuk dapat mengurai bagaimana transformasi pelembagaan yang ada didalam PKB dari tahun 1998-2014, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus yang merupakan jenis dari penelitian kualitatif. Penelitian ini dibatasi oleh ruang dan waktu, yaitu partai secara organisasi dan periodisasi waktu antara rentang Tahun 1998-2014. Untuk lebih memudahkan dalam operasionalisasi data, penelitian ini dibagi menjadi dua periode, yaitu periode kepemimpinan Gus Dur (1998-2008) dan periode kepemimpinan Muhaimin Iskandar (2009-2014). Dari kedua periode tersebut lalu dianalisis dengan empat variable pelembagaan partai, yaitu *systemness*, *value infusion*, *decision autonomy*, dan *reification*. Kedua periode tersebut kemudian menghasilkan sebuah kesimpulan penelitian mengenai perubahan pola pelembagaan dari Era Gus Dur ke Era Muhaimin. Perubahan pola inilah yang kemudian disebut sebagai transformasi pelembagaan partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PKB mengalami transformasi pelembagaan partai dari Era Gus Dur (1998-2008) ke Era Muhaimin Iskandar (2009-2014). *Pertama*, dalam dimensi *systemness*, corak pelembagaan PKB mulai berubah dari pola pengelolaan kekuasaan intra partai yang cenderung *oligarkis* dengan memusat kesalah satu figur tertentu ke pengelolaan intra partai yang cenderung *demokratis* dengan menyebarkan pos-pos kekuasaan ke banyak figur. *Kedua*, dalam dimensi *value infusion*, corak pelembagaan PKB mulai berubah dari ikatan partai yang cenderung tidak solid sehingga selalu memunculkan faksionalisasi intra partai ke ikatan partai yang cenderung solid sehingga tidak ada faksionalisasi lagi. *Ketiga*, dalam dimensi *decision autonomy*, corak pelembagaan PKB mulai berubah dari yang cenderung *independent* dengan tanpa masuk dalam sistem kartelisasi pemerintah di ke corak pelembagaan yang cenderung *dependent* dengan institusi diluar partai dengan selalu masuk dalam sistem kartelisasi pemerintah. *Keempat*, dalam dimensi *reification*, corak pelembagaan PKB mulai berubah dari pola membangun imaginasi publik sebagai partai NU dan cenderung menggunakan pendekatan sosiologis keagamaan dalam strategi elektoral ke pola membangun imaginasi publik sebagai partai modern yang terbuka dan mulai mengakomodasi pendekatan rasional dalam strategi elektoral.

(Kata Kunci : Partai Politik, Pelembagaan Partai, Transformasi Pelembagaan, Systemness, Value Infusion, Decision Autonomy, Reification)

ABSTRACT

Political parties institutionalization is not a top priority in efforts to institutionalize democracy in Indonesia. The study of the political parties institutionalization is often measured with strong and weak of the institutionalization itself rather than on how the institutionalization process took place. For this purpose, this study tries to trace how the transformation process of political parties institutionalization in Indonesia happened. This study takes a case of PKB institutionalization transformation in Gus Dur Era (1998-2008) to Muhaimin Iskandar Era (2009-2014). To explain the transformation process of institutionalization, this study uses Randal and Svasand's (2002) concept of institutionalization who tend to see the party institutionalization as a party management scheme based on four dimensions, namely the dimensions systemness, infusion values, decision autonomy, and reification.

In order to elaborate the way of transformation institutionalization in PKB in the year of 1998-2014, this research uses case study method which is a type of qualitative research. This study is limited by space and time, the party organization and the periodicity of time between 1998 to 2014. To make the operationalization of the data simple, this study is divided into two periods, the Gus Dur leadership period (1998-2008) and the Muhaimin Iskandar leadership periods (2009-2014). Then, both periods are analyzed by four variables of party, namely systemness, the value of infusion, decision autonomy, and reification. The two periods then produce a study conclusions regarding changes in the pattern of institutionalization of Gus Dur era to Muhaimin Iskandar era. The changing pattern is then referred as the transformation of the political parties institutionalization.

The results of this study indicate that PKB had been transformed from Gus Dur Era (1998-2008) to Muhaimin Iskandar Era (2009-2014). Firstly, in the dimensions of systemness, PKB institutionalization pattern began to change from the pattern of intra-party power management which tends to converge to one of specific oligarchic figures to the management of intra-party democratic which tends to spread the posts of power to many figures. Secondly, the infusion value dimensions, PKB institutionalization patterns began to change from unsolid party that always raises factionalization intra party to a solid party, so there was no factionalization anymore. Thirdly, in dimensions of decision autonomy, the institutionalization of PKB pattern began to change from independent which never join the system of government cartelization to the institutionalization patterns that tend dependent with institutions outside the party which always be included in the system of government cartelization. Fourth, in the dimensions of reification, PKB institutionalization pattern began to change from the pattern of building the public imagination as NU party and tend to use a sociological approach to religion in electoral strategies to establish a pattern of public imagination as a modern party that open and begin to accommodate a rational approach in electoral strategy.

(Keywords: Political Parties, party institutionalization, Transformation Institutionalization, Systemness, Value Infusion, Decision Autonomy, Reification).